

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat baik itu melalui kesempatan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya diserahkan pada pemerintah pusat, dikarenakan keterbatasan pemerintah pusat dalam mengendalikan sumberdaya yang ada khususnya yang ada pada masing-masing daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan ekonomi pada masing-masing daerah.

Pembangunan ekonomi daerah sendiri adalah proses dimana pemerintah daerah bersama pihak swasta dan masyarakat saling bekerja sama membentuk suatu pola kemitraan untuk mengelola sumberdaya dan potensi daerah yang ada guna merangsang perekonomian di daerah itu sendiri dan menciptakan lapangan kerja (Arsyad, 1999). Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing masing berbeda, karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber daya buatan serta sumber daya sosial.

Proses pembangunan setiap daerah berbeda, ada daerah yang melimpah sumber daya alam tetapi kurang dalam sumberdaya manusia, namun ada daerah yang sebaliknya kurang dalam hal sumber daya alam tapi melimpah dalam sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di

masing-masing daerah (Mauliddiyah, 2014). Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan kepada pemerataan, pertumbuhan dan keberlanjutan. Tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin tajam (Aprianoor dan Muktiali, 2015). Ketimpangan antar wilayah (*regional disparity*) muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Adanya desentralisasi juga mendorong ketimpangan antar wilayah semakin melebar (Krinantiya, 2014). Ketimpangan dalam suatu wilayah dapat berupa ketimpangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat diartikan sebagai perbedaan struktur ekonomi suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah yang lainnya (Mahardiki dan Santoso, 2013).

Ketimpangan ekonomi hampir terjadi di seluruh negara, termasuk Indonesia yang saat ini masih terdapat ketimpangan pembangunan antar suatu daerah. Kondisi tersebut dapat diketahui pada tingkat pembangunan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan barat Indonesia banyak menjadi pusat pertumbuhan atau pengembangan pembangunan, sehingga yang terjadi yaitu adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi serta kondisi pembangunan ekonomi yang sangat mencolok dari kedua wilayah tersebut. Pada kawasan barat Indonesia sendiri aktivitas perekonomian banyak berpusat Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat pembangunan ekonomi di Pulau Jawa lebih cepat dan lebih maju dibandingkan daerah lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, dari tiga provinsi yang ada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi (5,73%) dibandingkan Jawa Barat (5,53%) dan Jawa Tengah (5,23%) dari tahun 2013-2016. Namun faktanya meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tertinggi, tetapi tingkat kemiskinan di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 12,31 persen. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur lebih banyak disumbang oleh kabupaten di Pulau Madura khususnya Kabupaten Bangkalan dan Sampang yang menempati dua urutan tertinggi tingkat kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2013-2016 adalah 22,40 persen. Sedangkan rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang dari tahun 2013-2016 adalah 25,67 persen. Angka tersebut sangat jauh diatas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur yaitu 12,35 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, pemerataan pembangunan juga harus diperhatikan guna mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi dan tidak ada lagi daerah tertinggal. Fakta lain adalah dari tiga provinsi tersebut hanya Jawa Timur yang masih memiliki kabupaten dengan kondisi daerah tertinggal berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019 yaitu Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang. Dua kabupaten diantaranya berasal dari Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan dan Sampang.

Kondisi dan fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi pembangunan ekonomi di Pulau Madura cukup tertinggal dibandingkan daerah lainnya

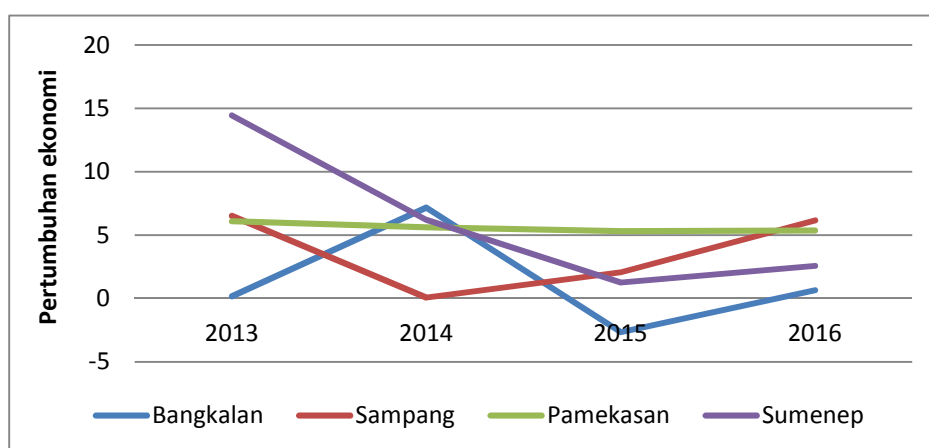
khususnya di Jawa Timur. Pulau Madura terdiri dari empat kabupaten mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Masing-masing kabupaten memiliki potensi daerah dan struktur ekonomi yang berbeda. Selain itu, secara keseluruhan Pulau Madura merupakan salah satu kepulauan di propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi yang besar pada bidang pertanian, potensi laut dan potensi sumber daya pertambangan serta energi yang cukup menjanjikan.

Potensi tersebut pada kenyataannya belum mampu dioptimalkan sepenuhnya sehingga tingkat pembangunan yang ada di Pulau Madura belum maksimal. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masuknya Kabupaten Sampang dan Bangkalan sebagai daerah tertinggal berdasarkan fakta yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Pulau Madura, dimana salah satunya yaitu dengan dibangunnya Jembatan Suramadu.

Adanya jembatan Suramadu secara langsung dapat memberikan dukungan atau dampak positif untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Pulau Madura dan tidak lagi terpusat di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang Kabupaten yang ada di Pulau Madura untuk menjadi daerah pengembangan industri dan akan menjadi prospektif serta layak dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan adanya peluang-peluang di atas diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten yang ada di Pulau Madura guna mendorong pembangunan ekonomi di Madura. Tetapi pada kenyataannya, adanya jembatan Suramadu yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi di Madura belum sepenuhnya berhasil.

Apabila melihat dari *trend* pertumbuhan ekonomi di 4 Kabupaten di Pulau Madura dari tahun 2013-2016 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dan bahkan ada yang menyentuh angka minus. Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa dari 4 kabupaten hanya Kabupaten Pamekasan yang pertumbuhannya relatif stabil. Sedangkan dari 4 kabupaten yang ada hanya Kabupaten Bangkalan yang pertumbuhan ekonominya bahkan pernah mencapai angka minus yaitu di tahun 2015 sebesar -2,66 persen. Sama halnya dengan Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep dan Sampang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif.

Kabupaten Sumenep pernah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2013 sebesar 14,45 persen namun langsung menurun tajam di tahun-tahun berikutnya. Dari keempat kabupaten di Pulau Madura rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Bangkalan sebesar 1,35 persen dan tertinggi adalah Kabupaten Sumenep sebesar 6,13 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di 4 Kabupaten Bangkalan tidaklah sama meskipun secara letak geografis hampir sama.



Sumber : Badan Pusat Statistik 4 Kabupaten di Pulau Madura, diolah

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB 4 Kabupaten di Pulau Madura Tahun 2013-2016 (%)

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang kurang merata maka pembangunan ekonomi di masing-masing kabupaten bisa saja berbeda, karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berbeda di masing-masing daerah dapat menyebabkan adanya ketimpangan baik itu ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar ketimpangan pendapatan yang ada di Pulau Madura. Apakah ketimpangan tersebut relatif merata ataukah lebar.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai ketimpangan wilayah, alat analisis Indeks Williamson sering digunakan untuk menentukan nilai ketimpangan suatu wilayah. Susanto (2011) sebelumnya pernah meneliti mengenai ketimpangan pendapatan di empat Kabupaten di Pulau Madura tahun 2005-2009. Ketimpangan pendapatan memakai Indeks Williamson menghasilkan nilai rata-rata yang berkisar antara 0,19 hingga 0,38. Nilai indeks tersebut memberikan indikasi bahwa ketimpangan yang terjadi antar kabupaten yang ada di pulau Madura masuk dalam kriteria sedang dalam kurun waktu 2005-2009.

Selain mengetahui kondisi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah juga perlu diketahui ketimpangan ekonomi yang dilihat dari pola dan struktur ekonomi masing-masing daerah sehingga dapat diketahui kabupaten mana yang tergolong daerah cepat dan maju, daerah berkembang cepat bahkan tertinggal. Susanto (2011) juga melakukan penelitian untuk menentukan klasifikasi daerah di Pulau Madura menggunakan alat analisis Tipologi Klassen dari kurun waktu 2005-2009. Berdasarkan kriteria Tipologi Klassen dapat diketahui bahwa pada empat kabupaten di pulau Madura yang termasuk pada klasifikasi daerah cepat maju dan tumbuh adalah kabupaten Bangkalan. Daerah yang termasuk

klasifikasi daerah maju tapi tertekan adalah kabupaten Sumenep dan yang termasuk daerah berkembang cepat adalah kabupaten Pamekasan. Sedangkan daerah dengan daerah relatif tertinggal adalah kabupaten Sampang.

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan di Pulau Madura serta klasifikasi daerah di Pulau Madura memang telah dilakukan sebelumnya namun dalam kurun waktu 2005-2009 dan dalam kurun waktu tersebut hingga 2016 tentunya terdapat perubahan di masing-masing Kabupaten di Pulau Madura. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kurun waktu yang berbeda yaitu tahun 2013-2016. Dengan demikian dapat diketahui apakah apakah ketimpangan pendapatan di Pulau Madura semakin melebar atau justru relatif merata. Selain itu, klasifikasi daerah menggunakan Tipologi Klassen juga tetap digunakan sehingga nantinya akan diketahui apakah ada perubahan klasifikasi daerah dari penelitian yang sebelumnya. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu mengarahkan pembangunan ekonomi yang lebih merata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Madura?
2. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Madura
2. Menganalisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten di empat kabupaten di Pulau Madura dalam menentukan kebijakan pembangunan khususnya dalam pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca lainnya mengenai kondisi ketimpangan wilayah serta pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

- **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan mengenai beberapa teori - teori yang relevan untuk digunakan dalam pembahasan lebih lanjut dalam penelitian serta beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam penulisan skripsi ini. Penulis memanfaatkan literature yaitu jurnal - jurnal serta buku pedoman yang digunakan untuk menambah wawasan mengenai teori – teori dan permasalahan yang sedang diteliti.

- BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

- BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dalam skripsi ini.

- BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan serta saran - saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.